

**TINJAUAN HAM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIAWI  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG – UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana

**Eka Satya Wijaya Natangwan**  
**NIM : 312016701**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
SEPTEMBER 2016**



### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ella Sarya Wijaya Notaryuan  
NIM : 312016701 Email : notaryuan@gmail.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Tinjauan HAM Terhadap Sanksi kebiri Kimiawi dalam  
Peraturan Perumahan Pengganti Undang-Undang (PERPPU)  
Nomor 1 Tahun 2016  
Pembimbing : 1. Arie Siswanto, S.H., M.Hum.  
2. \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

1956

Salatiga, 23-1-2017



Tanda tangan & nama terdug mahasiswa

(Ella Sarya Wijaya Notaryuan)



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Genta Wijaya Natangwan  
NIM : 21.1016.701 Email : Natangwan@gmail.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Tinjauan Ham Terhadap Sanksi Kebiri Keimanan dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (PPURU) Nomor 1 Tahun 2016

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak *non-eksklusif* kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan alasan tertulis dari pembimbing I dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 30 Januari 2017

Gita Genta Wijaya Natangwan  
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,  
1956

ARIE SISWANTO

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II


**TINJAUAN HAM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIAWI  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI  
UNDANG – UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana

**Eka Satya Wijaya Natangwan**  
NIM : 312016701

**Pembimbing**

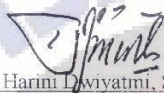
  
**Arie Siswanto, S.H., M.Hum.**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga**  
**SEPTEMBER 2016**

**1956**

## KOMISI PENGUJI

Penguji I



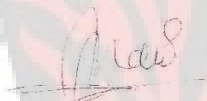
Sri Harini Dwiyaningrum, S.H., M.S.

Penguji II



Aric Siswanto, S.H., M.Hum.

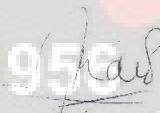
Penguji III



DR. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



DR. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum.

### LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI

EKA SATYA W N

NIM : 312016701

JUDUL : TINJAUAN HAM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIAWI  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG – UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016.

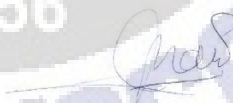
#### CATATAN :

1. Penulis footnote diperbaiki : tidak ada catatan perut( harus dihilangkan).
2. Perlu ditulis isi perpu no. 1 tahun 2016 secara lengkap, hasil penelitian bila fokus pada kelas, dijelaskan jangkauan pelaksanaan.
3. Ratisifikasi konvensi dikemukakan.
4. Pembahasan tidak diulang-ulang & kajian pistaka yang tidak relevan dibuang.
5. Tulisakan selenkapnya konvensi menentang penyiksaan khususnya pada definisi penyiksaan. Kamu tidak meliputi sakit yang timbul akibat sanksi hukuman (jelaskan).
6. Dalam analisis kesimpulan, asas, tujuan, dan nama HAM di jelaskan, HAM apa yang dilanggar.
7. Apa pertimbangan HAM dalam fokus tulisan itu?
  - Sebaiknya juga kaji HAM korban
  - Problematika pembatasan HAM sudah diatur dakam UUD 1945 Pasal 74.

Salatiga, 19 januari 2017

Penguji

1956



DR. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum.



### LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI

EKA SATYA W N

NIM : 312016701

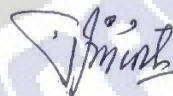
JUDUL : TINJAUAN HAM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIAWI  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG – UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016.

#### CATATAN :

1. Sajian dalam skripsi ini tidak sesuai standart penulisan dalam pedoman yang dikeluarkan fakultas.
2. Peraturan yang dipersoalkan tidak dimuat dalam skripsi.
3. Rumusan masalah merupakan janji untuk diuraikan dalam hal penelitian skripsi ini tidak dilakukan oleh penulis.
4. Bias saja secara tertulis dalam skripsi tidak memenuhi tetapi secara presentasi bisa menutup tetapi keduanya tidak terpenuhi.

Salatiga, 19 januari 2017

Penguji



Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S.

### LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI

EKA SATYA W N

NIM : 312016701


JUDUL : TINJAUAN HAM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIAWI  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI  
UNDANG – UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016.

#### CATATAN :

1. Kaitkan dengan konsep “degrading punishment”.

Salatiga, 19 januari 2017

Penguji

  
Arie Siswanto, S.H., M.Hum.



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Satya Wijaya Natangwan

NIM : 312016701

Judul Skripsi : TINJAUAN HAM TERHADAP SANKSI KEBIRI  
KIMIWI DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG - UNDANG (PERPPU)  
NOMOR 1 TAHUN 2016

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 18 Agustus 2017



EKA SATYA WIJAYA NATANGWAN

1956

## Ucapan Terima Kasih

Skripsi ini terselesaikan berkat limpahan rahmat serta berkah, hidayah Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW yang Penulis tunggu syafaatNya di akhir zaman. Oleh karena itu, dengan kerendahan diri Penulis meminta maaf karena belum bisa sepenuhnya melaksanakan perintah-perintahNYA dengan baik. Rasa puja dan puji syukur pula Penulis haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Penulis juga harus berterimakasih kepada:

*Pertama*, Bapak dan Ibu Penulis, Bapak Suratman dan Ibu Heru Krisnani atas seluruh curahan cinta kasih, keringat, seluruh hasil kerja keras yang diberikan kepada Penulis, yang senantiasa memberikan pengetahuan-pengetahuan, menghidupi, membiayai pendidikan Penulis selama ini, dan juga yang telah bersabar menghadapi perkataan dan kelakuan-kelakuan Penulis yang berdarah muda ini.

*Kedua*, kepada kakak penulis Ratna Intan Permata Sari.

*Ketiga*, Bapak Arie Siswanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing atas waktu dan perhatiannya dalam membimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

*Keempat*, Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Hsi., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ditambah seluruh keluarga besar civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, kepada semua dosen yang telah memberikan ilmu kepada Penulis, dan, Staff TU yang telah memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.

*Kelima*, *special thanks* kepada Mas Yakub Adi Kristanto, S.H., M.Hum.

*Keenam*, sahabat-sahabat Penulis; Pradikka Exa Budi Hartono, S.H., Aditya Reza Pratama, S.H., Davit Indra Permana S.H., Ragil Ridho Dewanto, Matthew Clarence M.H.S, Caesar Fortunus Wauran, S.H.(Dian), Paviolita Tiara, S.H., Adjie Susilo, Vian Chandra Prastika Adjie, Dimas, Banteng, Bang Kumis, Leo, Catur, Ghani (johnno), Ghani (si pos), Willy (si wess), Vian (pakdhe) Ardi. yang telah mau dan tidak lelah untuk bersabar dalam menjalani persahabatan dengan Penulis serta motivasi-motivasi yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini.

*Ketujuh*, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, khususnya teman-teman angkatan 2009 yang telah banyak membagi suka duka selama Penulis berkuliah.



## KATA PENGANTAR

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak akan pernah berhenti dibicarakan sepanjang sejarah kehidupan bahkan tidak hanya di Indonesia melainkan di setiap belahan dunia, baik korelasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih dalam bidang hukum sebagai penyangga utama Hak Asasi Manusia (HAM), karena dalam hukum adalah wadah dari hak dan kewajiban baik itu berupa hukum nasional maupun hukum internasional.

Hak Asasi Manusia sering disebut sebagai hak kodrati atau hak yang didapatkan manusia semenjak manusia itu lahir atau bahkan sebelum manusia itu lahir atau masih berada di dalam kandungan ibu, menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir dan menurut Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri Manusia, bersifat universal dan langgeng, menurut Konferensi Hak Asasi Manusia 1993 di Wina dirumuskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling berhubungan dan perbedaan pelaksanaan hak asasi manusia karena ciri khas pada masyarakatnya merupakan hal yang harus dihormati.

Hak Asasi Manusia dan Hak Dasar adalah berbeda, bahwa hak asasi menunjuk pada hak-hak yang mendapat pengakuan internasional dan hak dasar diakui melalui hukum nasional, oleh karena itu sifat universal muncul dan melekat dalam Hak Asasi Manusia.

Dari pengertian-pengertian diatas jadi dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak yang melekat pada manusia semenjak lahir maupun masih dalam

kandungan bersifat universal (diakui secara internasional) tidak memiliki batas waktu, saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung antara ragam Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia melekat pada setiap manusia tidak memandang suku, ras, jenis kelamin, golongan, agama maupun preferensi seksual. Sehingga dapat disebut bahwa Hak Asasi Manusia adalah mengenai kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena sifat “melekat” itulah Hak Asasi Manusia selalu mengikuti kehidupan tiap-tiap individu.

Karena melekat dalam kehidupan manusia atau individu oleh karena itu Hak Asasi Manusia juga melekat pada perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia atau individu tersebut, baik perbuatan sesuai dengan hukum maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan serta akibat dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan tersebut.

Banyak pertentangan dalam kalangan akademisi terutama dalam bidang hukum apakah pelaku tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia masih melekat Hak Asasi Manusianya? Jika melihat Hak Asasi Manusia dari korban yang dilanggar. Pertentangan tersebut dikhususkan dalam tindakan hukum yang diberikan kepada para pelanggar Hak Asasi Manusia seperti pemberian hukuman mati atau vonis mati.

Pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu tersebut memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi,

pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A.

Tujuan pemberatan sanksi tersebut adalah agar hakim dapat memberikan vonis yang berat kepada para pelaku kejahatan seksual dan pemberatan sanksi tersebut juga menambah ancaman pidana kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena menurut pemerintah kejahatan seksual kepada anak adalah bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dalam perkembangannya kejahatan terhadap anak di Indonesia semakin tinggi terutama kejahatan seksual baik itu pelecehan maupun kekerasan. Kejahatan seksual sendiri merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja termasuk tapi tidak pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

Pada tahun 2016 kejahatan seksual naik bahkan hingga 100%, dan pelaku kejahatan tersebut rata-rata adalah orang terdekat korban, baik itu orang tua, paman, saudara, tetangga di lingkungan korban. Bahkan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ini yang menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,



dalam kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong dimana korban tidak hanya diperkosa namun juga dibunuh serta mayatnya dibuang dijurang.

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun tersebut menimbulkan kegeraman publik dan memunculkan banyak pendapat bahwa kasus tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merendahkan martabat perempuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) serta kasus tersebut sudah melanggar terhadap 12 Jenis Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi terkhusus hak untuk, hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Oleh karena itu penyelesaian dalam tindak pidana terhadap Yuyun tersebut tidak bisa hanya berupa pemberian vonis kejahatan seksual biasa namun perlu vonis yang berat terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa tindakan berupa kebiri dan pengumuman identitas pelaku serta penanaman cip dan pidana tambahan.

Perlindungan Anak bukanlah hanya semata-mata perlindungan secara fisik maupun psikologis namun perlindungan anak merupakan perwujudan Hak Asasi

Manusia, dimana anak Hak Asasinya telah dijamin semenjak anak masih di dalam kandungan ibunya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 Ayat (2).

Indonesia dalam konstitusinya dalam perihal Hak Asasi Manusia, anak menjadi bagian terpenting yang berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* ” sebagaimana yang terdapat dalam BAB XA Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum khusus dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Sehingga dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menambah pemberatan sanksi dapat disimpulkan bahwa demi melindungi Hak Asasi Manusia terutama anak maupun anak yang menjadi korban kejahatan dirasa adil jika Perppu tersebut diterapkan dan diberlakukan.

## DAFTAR ISI

<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metodologi Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
 <b>BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	 14
2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	15
2.2. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	23
2.3. Hak Asasi Manusia di dalam Hukum Internasional .....	28
2.4. Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	42
2.5. HAM dalam Hukum Pidana dan Peradilan Pidana.....	48

2.6.	Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Kejahatan Seksual.....	52
2.7.	Hak Asasi Manusia Mengenai Penyiksaan (Torture).....	70
2.8.	Hukuman Kebiri dalam Perspektif Internasional .....	74
2.9.	Hakikat HAM dalam Perundangan yang Berlaku.....	79
2.9.1.	Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Manusia .....	84
2.9.2.	Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Indonesia.....	86
2.9.3.	Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Pribadi.....	87
2.9.4.	Kesejahteraan Hidup dalam Hak Asasi Manusia.....	91
2.9.5.	Wanita dalam Hak Asasi Manusia.....	94
2.9.6.	Perlindungan Anak Perwujudan Hak Asasi Manusia.....	96
2.9.7.	Kewajiban Dasar di dalam Hak Asasi Manusia.....	100
2.9.8.	Peran Pemerintah Terhadap Hak Asasi Manusia.....	101
2.9.9.	Batasan-batasan dalam Hak Asasi Manusia.....	102
2.9.10	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	102
2.10	Hakikat Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional...	131
2.11	Analisis.....	163

<b>BAB III KESIMPULAN &amp; SARAN.....</b>	<b>174</b>
--	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>178</b>
----------------------------	------------